

**POLA KOMUNIKASI JURU BICARA DALAM
MENYAMPAIKAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DI KABUPATEN ACEH BARAT**

DANA ISMAWAN



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2025

**POLA KOMUNIKASI JURU BICARA DALAM
MENYAMPAIKAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DI KABUPATEN ACEH BARAT**



DANA ISMAWAN

NIM: 231007009

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Untuk Mendapatkan
Gelar Magister Dalam Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

POLA KOMUNIKASI JURU BICARA DALAM MENYAMPAIKAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI KABUPATEN ACEH BARAT

DANA ISMAWAN

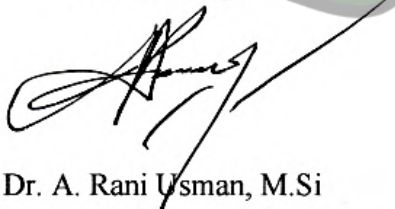
NIM: 231007009

Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. A. Rani Usman, M.Si

Pembimbing II



Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A

LEMBAR PENGESAHAN
POLA KOMUNIKASI JURU BICARA DALAM
MENYAMPAIKAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DI KABUPATEN ACEH BARAT

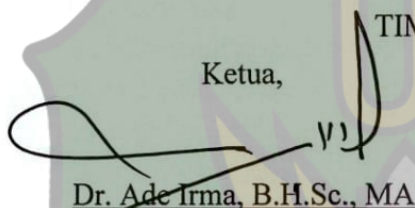
DANA ISMAWAN
NIM. 231007009

Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

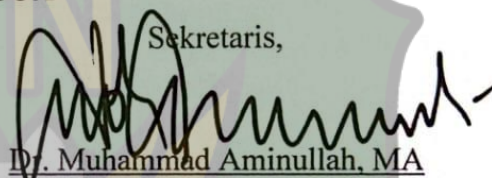
Tanggal: 05 Agustus 2025 M
11 Safar 1447 H

TIM PENGUJI

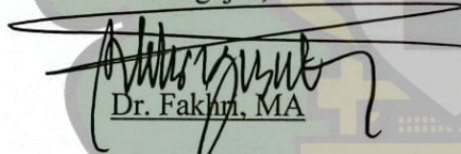
Ketua,


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA

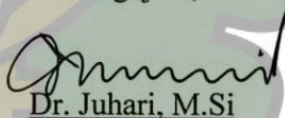
Sekretaris,


Dr. Muhammad Aminullah, MA

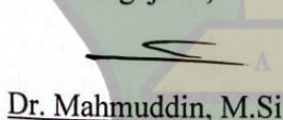
Penguji I,


Dr. Fakhri, MA

Penguji II,


Dr. Juhari, M.Si

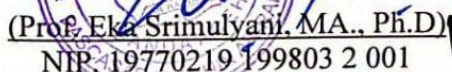
Penguji III,


Dr. Mahmuddin, M.Si

Penguji IV,


Dr. A. Rani Usman, M.Si

Banda Aceh, 08 Agustus 2025
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D.)
NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dana Ismawan
Tempat, Tanggal Lahir : Meulaboh, 23 April 1996
NIM : 231007009
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 07 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Dana Ismawan

NIM. 231007009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman. Penelitian ini menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2021. Transliterasi ini dimaksud untuk mampu mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian, diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab yang di dalam tulisan sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf, Sebagian dengan tanda, dan Sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (Dengan Titik dibawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	Zet dan Ha

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	E dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Tha'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zha'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

3. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan Ya	ai	A dan I
اِ	Fathah dan Wa	au	A dan U
اَ اِ اُ	Fathah dan Alif atau Alif Layyinah (tertulis ya)	ā	A (dengan garis diatas)
اِ	Kasrah dan Ya	ī	I (dengan titik diatas)
اِ	Ḍammah dan Wa	ū	U (dengan titik diatas)

PEDOMAN SINGKATAN

No.	Singkatan	Kepanjangan
1.	Swt.	Subhanahu wa ta'ala
2.	Saw.	Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
3.	M.	Muhammad
4.	HR.	Hadits Riwayat
5.	Hlm.	Halaman
6.	Terj.	Terjemahan
7.	IAIN	Institut Agama Islam Negeri
8.	W.	Wafat



9.	H.	Hijriah
10.	M	Masehi
11.	t.th.	Tanpa Tahun Terbit
12.	t.tp.	Tanpa Tempat Penerbit
13.	t.p.	Tanpa Penerbit
14.	Cet.	Cetakan
15.	Jil.	Jilid
16.	Ra.	Radhiallahu’/ha
17.	As.	‘Alaihi Sallam
18.	Dkk.	Dan Kawan-Kawan
19.	Dst.	Dan Seterusnya
20.	Pj.	Penjabat
21.	SKPK	Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
22.	Plt.	Pelaksana Tugas
23.	ASN	Aparatur Sipil Negara

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji serta syukur kepada Allah Swt. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulisan tesis yang berjudul **“POLA KOMUNIKASI JURU BICARA DALAM MENYAMPAIKAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI KABUPATEN ACEH BARAT”** dapat selesai tepat pada waktunya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada besar Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umat dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian tesis ini. Terima kasih kepada kedua orang tua Ibu Asmarita dan Ayah (Alm) Ir. Lukman, istri tercinta Nurul Fitri, SP, anak tersayang Kanaya Mahaputri, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih kepada Pj. Bupati Aceh Barat/ Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Bapak Drs. Mahdi Efendi dan Ibu Radhiah, S.Pd.I yang telah memberikan dukungan untuk melanjutkan studi di program pascasarjana.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Direktur Pascasarjana Ibu Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D., bersama Wakil Direktur Pascasarjana Bapak Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag, M.Ed yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya terima kasih kepada Dosen Pembimbing I Bapak Dr. A Rani Usman, M.Si. dan Dosen Pembimbing II Ibu Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA., yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan tesis ini.

Ungkapan terima kasih dan takzim pula kepada para dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Prof. Dr.phil. Saiful Akmal, M.A, Dr. Muhammad Aminullah, M.A., Dr. Juhari, M.Si., Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D., Dr. Fakhri, MA., Muhammad Syukur, Dr. Arifin Zain, M.Ag., Dr. T. Lembong Misbah, S.Ag., M.A., Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc., M.A., Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag., Dr. Mahmuddin, M.Si., Azman, S.Sos.I., M.I.Kom., Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si., Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd., serta Ibu Ismiati, S.Ag., M.Si., Ph.D yang turut serta memberikan masukan dalam penyempurnaan tesis ini.

Terima kasih kepada Pimpinan dan segenap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Bapak Hidayat, SE selaku Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab serta BKPSDM Kabupaten Aceh Barat, para narasumber, rekan-rekan pascasarjana dan seluruh Civitas Akademika Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah banyak mendukung proses perkuliahan selama ini.

Semoga penelitian ini dapat menjadi karya ilmiah yang memberikan manfaat dan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam mengoptimalkan komunikasi publik melalui peran juru bicara. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memotivasi dalam proses penulisan tesis ini. Terima Kasih

Meulaboh, 07 Juni 2025

Peneliti,



Dana Ismawan

Abstrak

Judul Tesis : Pola Komunikasi Juru Bicara Dalam
Menyampaikan Program dan Kebijakan
Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat
Nama/NIM : Dana Ismawan/231007009
Pembimbing I : Dr. A. Rani Usman, M.Si
Pembimbing II : Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
Kata Kunci : Pola Komunikasi, Juru Bicara, Pemerintah

Penelitian ini menganalisis pola komunikasi juru bicara dalam menyampaikan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada tiga aspek, yaitu bagaimana pola komunikasi juru bicara dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah, faktor pendukung, serta faktor penghambat dalam menerapkan pola komunikasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan konsep bentuk-bentuk pola komunikasi yang disampaikan oleh Joseph A Devito. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah, proses komunikasi yang dilakukan juru bicara menggambarkan empat bentuk pola komunikasi. Pola komunikasi rantai dan Y tergambar pada konteks komunikasi tidak langsung karena proses penyampaian pesan yang terstruktur dan memanfaatkan peran media massa. Pola komunikasi roda tergambar dari komunikasi langsung yang dilakukan juru bicara kepada masyarakat melalui pertemuan langsung. Sementara pola komunikasi bintang menggambarkan proses komunikasi juru bicara kepada media massa. Faktor pendukung penerapan pola komunikasi juru bicara diantaranya yaitu keterlibatan media massa, dukungan pimpinan dan stakeholder terkait, serta pengalaman kerja dibidang komunikasi, sementara faktor penghambat penerapan pola komunikasi tersebut yakni perbedaan latar belakang masyarakat, keterbatasan anggaran dan jangkauan pesan dalam komunikasi langsung, serta keterbatasan kemampuan kajian teknis.

مستخلص البحث

عنوان البحث : تخطيط الإتصال للمتحدث الرسمي في تقديم البرامج وسياسة الحكومة بمنطقة أنشيه بارات

الإسم/رقم القيد : دانا إسموان / ٢٣١٠٠٧٠٠٩
المشرف الأول : د. أ. راني عثمان، M.Si
المشرف الثاني : د. أدي إرما، B.H.Sc., M.A
الكلمة الرئيسية : تخطيط الإتصال، المتحدث الرسمي، الحكومة

يهدف البحث للتحليل التخطيطي الإتصال المتحدث الرسمي في تقديم البرامج وسياسة الحكومة بمنطقة أنشيه بارات. أما مشكلة البحث فتحدد على ثلاثة أشياء: كيف تخطيط الإتصال للمتحدث الرسمي في تقديمها، ثم العوامل الايجابية والسلبية في تطبيقه. يستخدم الباحث بطريقة البحث النوعي على مفهوم التخطيط الإتصال الذي قدمه Joseph A Devito. أما نتيجة البحث يدل على أن تقديم البرامج وسياسة الحكومة وعوامل الاتصال الذي يقوم المتحدث الرسمي لها أربعة أشياء: قد تم التصوير في تخطيط الإتصال المتسلسل y بسياق الإتصال غير مباشرة لأن توصيلها منظمة وبجانب دور وسيلة الاعلام، ويتضح من خلال الاتصال المباشر الذي يقوم به المتحدث الرسمي للمجتمع عبر الاجتماعات بالمباشرة. ومع ذلك، يتصف الاتصال النجمي بالاتصال المتحدث الرسمي للوسيلة الاعلام، أما العوامل الايجابية لتنفيذ في اتصال بين المتحدث الرسمي ووسيلة الاعلام ودعما من الرئيس وأصحابها بالاضافة إلى خبرة العمل في مجال الاتصالات. والعوامل السلبية لتنفيذ تخطيط الاتصال في اختلافات المجتمعات والحدود على المالية ووصول الرسائل في الاتصال المباشر وعلى قدرات الدراسية الفنية.

Abstract

Title : Communication Patterns of Internal Spokespersons Delivering Programs and Policies Government in West Aceh Regency
Name/NIM : Dana Ismawan/231007009
Supervisor I : Dr. A. Rani Usman, M.Si
Supervisor II : Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
Keywords : Communication Patterns, Spokesperson, Government

This study analyzes the communication patterns of spokespersons in conveying programs and policies of the West Aceh Regency Government. The formulation of this research problem focuses on three aspects, namely how the communication pattern of the spokesperson in conveying government programs and policies, supporting factors, and inhibiting factors in implementing communication patterns. This research method uses a qualitative method using the concept of forms of communication patterns conveyed by Joseph A Devito. The results of the study show that in conveying government programs and policies, the communication process carried out by the spokesperson describes four forms of communication patterns. Chain and Y communication patterns are depicted in the context of indirect communication because the process of delivering messages is structured and utilizes the role of mass media. The pattern of wheel communication is illustrated by direct communication carried out by the spokesperson to the public through direct meetings. Meanwhile, the star communication pattern describes the process of communication between spokespersons to the mass media. The supporting factors for the implementation of the spokesperson communication pattern include the involvement of the mass media, the support of leaders and related stakeholders, and work experience in the field of communication, while the factors that inhibit the implementation of the communication pattern are differences in community backgrounds, limited budget and message reach in direct communication, and limited technical study capabilities.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.4.3. Manfaat Akademis	7
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.5.1. Definisi Komunikasi	7
1.5.2. Pola Komunikasi	13
1.5.3. Juru Bicara	17
1.5.4. Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	23
1.5.5. Penelitian Terdahulu	30
1.6. Kerangka Teori.....	40
1.7. Metode Penelitian.....	42
1.7.1. Jenis Penelitian.....	42
1.7.2. Lokasi Penelitian.....	44
1.7.3. Sumber Data.....	45
1.7.3.1. Data Primer.....	46

1.7.3.2. Data Sekunder	46
1.7.4. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian	46
1.7.4.1. Subjek Penelitian	46
1.7.4.2. Objek Penelitian	48
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data	48
1.7.5.1. Wawancara	49
1.7.5.2. Observasi	50
1.7.5.3. Dokumentasi	51
1.7.6. Teknik Analisis Data	51
1.7.7. Teknik Validasi Data	54
1.7.8. Rancangan Jadwal Penelitian	54
1.8. Sistematika Pembahasan	55
BAB II LANDASAN TEORI	57
2.1. Model Komunikasi Harold D Lasswell	57
2.2. Model S-O-R (<i>Stimulus-Organism-Response</i>)	58
2.3. Teori Kredibilitas Sumber (<i>Source Credibility Theory</i>) .	60
2.4. Teori Keunggulan dalam Hubungan Masyarakat (<i>Excellence in Public Relations Theory</i>)	61
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	65
3.1. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat	65
3.2. Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	67
3.3. Tugas dan Wewenang Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	72
3.4. Pola Komunikasi Juru Bicara dalam Menyampaikan Program dan Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat	77
3.4.1. Pola Komunikasi Rantai dan Pola Komunikasi Y	80
3.4.2. Pola Komunikasi Roda	89
3.4.3. Pola Komunikasi Bintang	97
3.5. Faktor Pendukung Juru Bicara Dalam Menerapkan Pola Komunikasi	102

3.5.1. Keterlibatan Media Massa.....	102
3.5.2. Dukungan Pimpinan dan <i>Stakeholder</i> Terkait	104
3.5.3. Pengalaman Kerja dibidang Komunikasi	107
3.6. Faktor Penghambat Juru Bicara Dalam Menerapkan Pola Komunikasi	112
3.6.1. Perbedaan Latar Belakang Masyarakat	112
3.6.2. Keterbatasan Anggaran dan Jangkauan Komunikasi Yang Terbatas	116
3.6.3. Keterbatasan Kemampuan Kajian Teknis	117
3.7. Pembahasan.....	121
3.7.1. Penerapan Pola Komunikasi Juru Bicara Dalam Menyampaikan Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.....	121
3.7.2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pola Komunikasi	143
BAB IV PENUTUP	151
4.1. Kesimpulan.....	150
4.2. Rekomendasi	151
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN SK PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS	
LAMPIRAN SURAT PENELITIAN	
LAMPIRAN SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN	
LAMPIRAN SURAT SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN	
LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA	
LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA	
LAMPIRAN DOKUMENTASI LAINNYA	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.5.2.1.	Pola Komunikasi Lingkaran	15
Gambar 1.5.2.2.	Pola Komunikasi Roda	15
Gambar 1.5.2.3.	Pola Komunikasi Y	16
Gambar 1.5.2.4.	Pola Komunikasi Rantai/bersambung	16
Gambar 1.5.2.5.	Pola Komunikasi Bintang.....	17
Gambar 1.6.1.	Kerangka Pemikiran dalam Penelitian	42
Gambar 1.7.2.1.	Peta Lokasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat	45
Gambar 1.7.6.1.	Analisis data dari model Miles dan Huberman	52
Gambar 2.1.1.	Model Komunikasi yang diadopsi dari Model Komunikasi menurut Harold D Lasswell	57
Gambar 2.2.2.	Model Komunikasi yang diadopsi dari Model Komunikasi S-O-R.....	60
Gambar 3.1.1.	Bagan Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.....	67
Gambar 3.2.1.	Berita Terkait Penunjukan Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.....	69
Model 3.3.1.1.	Pola Komunikasi Rantai yang diadopsi dari Pola Komunikasi menurut Joseph A Devito	81
Gambar 3.4.1.1.	Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan koordinasi bersama Ketua dan Sekretariat MPU Aceh Barat....	83
Gambar 3.2.1.	Berita pernyataan Juru Bicara terkait pelaksanaan agenda Penutupan Expo PON Aceh-Sumut ke-21 yang bersamaan dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	87

Model 3.3.1.2.	Pola Komunikasi Y yang diadopsi dari Pola Komunikasi menurut Joseph A Devito	88
Gambar 3.4.2.1.	Juru Bicara Melakukan Pertemuan Langsung dalam menyampaikan program dan Kebijakan Pemerintah.....	92
Model 3.4.2.2.	Pola Komunikasi Roda yang diadopsi dari Pola Komunikasi menurut Joseph A Devito	93
Model 3.4.3.1.	Pola Komunikasi Bintang yang diadopsi dari Pola Komunikasi menurut Joseph A Devito	98
Gambar 3.4.3.2.	Juru Bicara Melakukan Pertemuan bersama Wartawan	100
Gambar 3.7.1.1.	Model Pola Komunikasi Rantai dan Y yang diadopsi dari Model Interaksi dan Komunikasi Etnis China dengan Etnis Aceh menurut A. Rani Usman.....	127
Gambar 3.7.1.2.	Model Pola Komunikasi Roda yang diadopsi dari Model Interaksi dan Komunikasi Etnis China dengan Etnis Aceh menurut A. Rani Usman.....	129
Gambar 3.7.1.3.	Model Pola Komunikasi Bintang yang diadopsi dari Model Interaksi dan Komunikasi Etnis China dengan Etnis Aceh menurut A. Rani Usman.....	131
Gambar 3.7.1.4.	Pola Komunikasi Lingkaran yang diadopsi dari Pola Komunikasi menurut Joseph A Devito	132
Gambar 3.7.1.5.	Indikator Komunikasi Efektif Menurut Suranto Aw	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5.4.1	Tabel Penelitian Terdahulu	37
Tabel 1.7.5.1.1.	Daftar Informan Penelitian	50
Tabel 1.7.8.1	Rancangan Jadwal Penelitian Tesis	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan implementasi dan terealisasinya berbagai program maupun kebijakan pemerintah daerah sangat bergantung dari besarnya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kebijakan tersebut. Penyampaian informasi terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah menjadi aspek penting dan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan jalannya pemerintahan, sehingga hal ini perlu dilakukan melalui komunikasi publik yang efektif.

Komunikasi publik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan dan tidak dapat diabaikan.¹ Dalam hal ini, kehumasan pemerintah merupakan aspek penunjang yang menjalankan fungsi komunikasi tersebut dengan menjembatani interaksi yang terjalin antara masyarakat, pemerintah dan regulator, sekaligus menjadi perpanjangan tangan dari setiap kebijakan pemerintah.²

Kehumasan pemerintah juga memiliki tugas untuk menerima berbagai aspirasi dari masyarakat umum, serta mendorong penyebaran informasi lebih cepat, terutama mengenai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 09 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Dasar aturan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk dapat melakukan penyebaran informasi melalui

¹Liu, B. F., Horsley, J. S., dan Yang, K, "Overcoming negative media coverage: Does government communication matter?" dalam Happy Indah Nurlita Goeritman. *Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 melalui Media Sosial*" (*Jurnal IPTEK-KOM Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, 2021), Hlm. 4

²Suprawoto, *Government Public Relations: Perkembangan dan Praktik di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), Hlm. 48

berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara akurat, cepat, jujur, dan mudah dipahami oleh masyarakat.³

Sejalan dengan hal tersebut, ditengah pesatnya era digitasiasi saat ini, pemerintah dituntut pula untuk menyampaikan informasi tentang program dan kebijakannya kepada masyarakat. Hal tersebut sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pentingnya jalinan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah mendasari terbentuknya pola komunikasi sebagai suatu bagian dari *government public relations (GPR)*.

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seharusnya mampu memperhatikan dan menyampaikan pesan-pesan terkait sistem pemerintahan yang tengah dijalankan termasuk memperbarui dasar hukum atau peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, diplomasi internasional, isu kesehatan dan keamanan, serta isu-isu lainnya secara efektif dan efisien. Seorang juru bicara menjadi tokoh yang diakui keandalannya, sehingga menjadi pusat dalam menjalankan komunikasi publik.⁴

Keberadaan sosok juru bicara juga menjadi aspek penting dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat, terlebih ditengah tuntutan keterbukaan informasi publik yang mewajibkan pemerintah daerah sebagai badan publik menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk berbagai program dan kebijakan yang tengah dijalankan.

Juru bicara sebagai komunikator publik diberi ruang untuk mampu menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Juru bicara memegang peranan penting sebagai salah satu bagian dari pemerintahan yang bertugas memahami dan mengevaluasi berbagai pendapat serta isu yang berkembang di masyarakat, untuk

³Ilham Hilal Ramadhan, “Strategi Government Publik Relation (GPR) Pemda DIY dalam Mengelola Informasi Publik Pasca Pandemi COVID-19”, *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6 No. 2 (2023). Hlm.187

⁴Happy Indah Nurlita Goeritman, “Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 melalui Media Sosial”, *Jurnal IPTEK-KOM Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, Vol. 23 No.1 (2021), Hlm.4

selanjutnya digunakan sebagai masukan terhadap pengambilan keputusan maupun kebijakan kebijakan, sehingga dapat menciptakan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat.

Disamping itu, melalui semangat keterbukaan informasi publik, pelaksanaan pemerintah yang baik dapat diwujudkan dengan menempatkan dan menunjuk seorang juru bicara pemerintah sebagai komunikator publik guna mendorong pemahaman dan keterlibatan publik pada setiap program dan kebijakan pemerintah.

Dalam konteks kajian penelitian ini, juru bicara pemerintah kabupaten adalah sosok yang secara resmi mewakili suara dan sikap pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi, kebijakan, serta program-program kepada publik. Secara spesifik, juru bicara pemerintah kabupaten menjadi komunikator strategis yang memahami substansi kebijakan, memahami visi dan misi kepala daerah, responsif terhadap dinamika isu-isu lokal, menjaga citra pemerintah daerah, mampu membangun hubungan baik dengan media massa, serta memiliki keterampilan komunikasi yang baik.

Demi mendukung kelancaran kinerja khususnya dalam pengelolaan komunikasi publik, Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat telah beberapa kali menunjuk juru bicara hingga yang terakhir ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penunjukan Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2024. Berdasarkan surat keputusan tersebut, juru bicara memiliki beberapa tugas-tugas seperti menyampaikan informasi tentang kegiatan pemerintah yang bersumber dari beragam liputan dengan penyajian data dukung yang lengkap, cermat dan terpercaya, serta melaksanakan tugas lainnya yang relevan dengan penyampaian informasi pemerintah daerah.

Penunjukan juru bicara dapat didasari oleh berbagai pertimbangan yang sangat bergantung pada kebijakan pimpinan, konteks organisasi, institusi, atau pemerintah. Beberapa faktor yang umumnya menjadi dasar penunjukan seseorang menjadi juru bicara adalah kemampuan komunikasi yang baik, kepercayaan dan kredibilitas, kemampuan mengelola krisis, kedekatan secara politik,

pengalaman dan rekam jejak atau kemampuan beradaptasi dengan media dan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 10 September 2024, didapati permasalahan yang berpotensi mempengaruhi optimalnya peran juru bicara tersebut, dimana pergantian juru bicara yang dilakukan membuat pola komunikasi yang sebelumnya telah terbentuk dan berjalan, menjadi berubah menyesuaikan dengan pola komunikasi yang diterapkan oleh juru bicara yang baru, sehingga diperkirakan hal ini dapat mempengaruhi keefektifan proses pengiriman pesan yang dilakukan dalam menyampaikan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Selain itu, berdasarkan pengamatan juga ditemukan pernah terjadinya permasalahan penyampaian pesan terhadap media dan wartawan pada tahun 2022 lalu, sebagaimana yang diberitakan pada laman portal berita aceHTrend.com, bithe.co, kabaraktual.id, acehonline.co, rri.co.id, ajnn.net, acehekspres.com, dan indonesiaglobal.net tanggal 8 November 2022. Permasalahan tersebut muncul diawali karena kesalahan penyampaian informasi oleh juru bicara pemerintah daerah kepada wartawan serta kesalahpahaman penafsiran pesan terkait dengan prosedur pelayanan surat permohonan apabila hendak melakukan wawancara kepada Bupati Aceh Barat, sehingga kondisi ini dinilai dapat mengganggu keharmonisan hubungan pemerintah daerah dengan media massa yang telah terjalin.

Hasil pengamatan tersebut turut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 Hidayat Isa, SE pada wawancara awal dilakukan tanggal 21 Oktober 2024, bahwa sampai saat ini masih belum terdapat pola komunikasi yang baku atau tertulis untuk diterapkan, sehingga tugas-tugas juru bicara hanya dijalankan berdasarkan uraian tugas dalam surat keputusan Bupati Aceh Barat, sesuai

dengan situasi dan dinamika kebutuhan penyampaian informasi pemerintah daerah, serta turut dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk dan arahan pimpinan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dilihat bahwa belum tergambaranya pola komunikasi juru bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sehingga perlu penelaahan yang lebih komprehensif untuk menggambarkan pola komunikasi yang diterapkan agar proses penyampaian pesan mengenai program dan kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan optimal.

Oleh karena itu, dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian tesis ini berjudul **“Pola Komunikasi Juru Bicara Dalam Menyampaikan Program dan Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat”**. Penelitian ini mengkaji bagaimana pola komunikasi yang diterapkan oleh juru bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah, sekaligus berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan pola komunikasi tersebut. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan komunikasi publik yang dilakukan, serta turut memberikan gambaran dan rekomendasi perbaikan secara ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan aspek komunikasi dilingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengangkat beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pola komunikasi juru bicara dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat?
2. Apa faktor pendukung juru bicara dalam menerapkan pola komunikasi untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat?
3. Apa faktor penghambat juru bicara dalam menerapkan pola komunikasi untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pola komunikasi juru bicara dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung juru bicara dalam menerapkan pola komunikasi untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3. Untuk menganalisis faktor penghambat juru bicara dalam menerapkan pola komunikasi untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian Pola Komunikasi Juru Bicara Dalam Menyampaikan Program dan Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat ini, diharapkan dapat memberikan sumber informasi yang semakin komprehensif terkait pola penyampaian informasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap lahirnya berbagai pemikiran baru maupun pengembangan konsep dalam ranah pola komunikasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat khususnya pejabat yang ditunjuk sebagai juru bicara untuk menentukan dan menerapkan pola komunikasi yang efektif dalam menyampaikan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengoptimalkan pelaksanaan kinerja komunikasi publik yang efektif, sekaligus memberikan pandangan yang dapat bermanfaat bagi penentuan langkah dan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan citra positif pemerintah.

1.4.3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru pada kajian literatur penelitian kualitatif. Hal ini dapat membantu memperkaya pemahaman mengenai metodologi dan pendekatan penelitian kualitatif dalam konteks spesifik yang dijelaskan dalam penelitian ini, sekaligus mampu menyumbangkan pemikiran baru dan wawasan pada bidang ilmu komunikasi, khususnya yang terkait dengan konteks juru bicara dan pola komunikasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga terhadap perkembangan teori dan praktik komunikasi, memberikan perspektif yang lebih luas, serta menjadi landasan bagi penelitian lanjutan terkait implementasi pola komunikasi.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Definisi Komunikasi

Komunikasi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan interaksi sehari-hari. Onong Uchjana Effendy berpendapat bahwa konsep komunikasi perlu dilihat dari dua perspektif, yakni dari perspektif umum dan paradigmatik.

Secara etimologis kata komunikasi berasal dari kata latin *communicatio* yang selanjutnya berasal dari kata *communis* yang mempunyai arti sama. Dalam pengertian ini, komunikasi terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat mempunyai pendapat yang sama mengenai apa yang dikomunikasikan. Secara terminologi, komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari satu orang ke orang lain. Dari definisi ini, jelas bahwa sejumlah besar orang terlibat dalam komunikasi. Oleh karena itu, jenis komunikasi ini disebut komunikasi manusia.⁵

Sementara itu, dari sudut pandang pemahaman paradigmatik, komunikasi dipahami sebagai suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain, yang kemudian membentuk sikap, pendapat, dan perilaku orang tersebut. Berdasarkan hal tersebut

⁵Zikri Fachrul Nurhadi dan Achmad Wildan Kurniawan, "Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi" *Jurnal Komunikasi* Vol 3 No. 1 (2017), Hlm. 91.

dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain yang dilakukan oleh seseorang, sehingga terbentuklah sikap, pendapat, dan perilaku orang tersebut, yang mana proses komunikasi ini dapat dilakukan langsung (tatap muka) atau tidak langsung (komunikasi melalui media).⁶

Pendapat lain seperti dikemukakan oleh Harold Laswell yang mendefinisikan komunikasi dengan menjawab pertanyaan *Who Says What in Which Channel to Whom With What Effect*. Pendapat ini dapat dipahami sebagai siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan bagaimana pengaruhnya, atau dapat diringkas dengan rumus S-M-C-R-E (Source-Message-Channel-Receiver-Effect).⁷

Secara umum, terdapat beberapa jenis komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

a. Komunikasi Verbal dan Nonverbal

Pada dasarnya, setiap orang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini karena manusia bukan hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial yang perlu terus berkomunikasi satu sama lain. Berdasarkan cara penyampaian informasi, komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi verbal (lisan) dan komunikasi nonverbal (tertulis).

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak. Sementara komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan melibatkan simbol-simbol, gambar, naskah, atau sejenisnya.⁸

b. Komunikasi Intrapersonal

Menurut Hafied Cangara, komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam diri

⁶Zikri Fachrul Nurhadi dan Achmad Wildan Kurniawan, *Kajian Tentang Efektivitas...* Hlm. 91

⁷Andi Faisal Bakti, "Communication and Family Planning in Islam In Indonesia: South Sulawesi Muslim Perception of a Global Development Program" dalam Muslimin, *Komunikasi Islam* (Jakarta: Amzah, 2021). Hlm.1

⁸Desi Damayani Pohan dan Ulfi Sayyidatul Fitria, "Jenis-Jenis Komunikasi" *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*: Vol. 2 No. 3 (2021), Hlm. 34

seseorang, dengan kata lain komunikasi jenis ini adalah proses berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Disini proses komunikasi terjadi saat orang memberi makna pada apa yang mereka amati atau apa yang menarik perhatian mereka. Objek dalam hal ini dapat berwujud benda, gejala alam, kejadian, pengalaman, fakta, dan sebagainya yang mempunyai arti bagi manusia, baik yang terjadi secara eksternal maupun internal dalam tubuh manusia.⁹

c. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal secara umum merujuk pada komunikasi tatap muka antara orang-orang. Setiap orang yang terlibat dalam komunikasi mempengaruhi persepsi orang lain. DeVito menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan yang jelas dan terhubung dalam beberapa cara, misalnya antara seorang ibu dan anaknya, seorang dokter dan seorang pasien, antara dua orang dalam sebuah wawancara, atau bentuk komunikasi lainnya.¹⁰

d. Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah suatu kegiatan yang dilakukan antara satu orang atau lebih untuk menyampaikan pesan melalui media massa cetak, elektronik, atau digital, umumnya dengan harapan adanya timbal balik. Namun, komunikasi massa dalam arti sempit adalah komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah besar orang.¹¹

e. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi dalam sekelompok kecil orang, seperti dalam rapat, pertemuan,

⁹Rahmiana, "Komunikasi Intrapersonal Dalam Komunikasi Islam" *Jurnal Peurawi* Vol. 2 No. 1 (2019). Hlm. 79

¹⁰Citra Anggraini, ed, "Komunikasi Interpersonal" *Jurnal Multidisiplin Dehasen* Vol. 1 No. 3 (2022). Hlm. 337

¹¹Winda Kustiawan, ed, "Komunikasi Massa" *Journal Analytica Islamica* Vol. 11 No. 1 (2022), Hlm.3

atau konferensi.¹² Menurut Michael Burgoon, komunikasi kelompok adalah interaksi pribadi tiga orang atau lebih untuk tujuan tertentu, seperti bertukar informasi atau memecahkan masalah, dimana para anggota dapat mengingat secara akurat karakteristik pribadi anggota lainnya.¹³

f. Komunikasi Organisasi

Menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah proses bertukarnya pesan dalam suatu jaringan yang saling ketergantungan untuk menyikapi berbagai situasi lingkungan yang tidak pasti. Pentingnya komunikasi organisasi yang disajikan membuat kita memahami bahwa komunikasi dua arah dalam suatu organisasi membantu dalam menghadapi situasi yang terus berubah. Pertukaran pesan memberikan kesempatan untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti.¹⁴

g. Komunikasi Antar Budaya

Komunikasi antarbudaya adalah interaksi dan komunikasi interpersonal antara dua orang atau lebih dari latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, interaksi dan komunikasi yang terjadi memerlukan tingkat keamanan dan kesopanan tertentu, serta antisipasi terhadap satu atau beberapa aspek tertentu dari lawan bicara.¹⁵

Dalam perkembangannya, keilmuan komunikasi mulai diterapkan dalam konteks profesional, sehingga kemudian melahirkan beberapa pengembangan jenis komunikasi, diantaranya:

¹²Anwar, Arifin. "Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas" dalam Dewi Hernikawati, "Komunikasi Kelompok Dan Upaya Pengembangannya (Kasus pada Galeri Internet BPPKI Jakarta Terkait Upaya Revisi Instrument Evaluasi Peserta)" *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* Vol. 21 No. 1 (2017)

¹³Wiryanto, "Pengantar Ilmu Komunikasi" dalam Dewi Hernikawati, *Komunikasi Kelompok Dan Upaya Pengembangannya...*Hlm. 86

¹⁴Syukrinur A. Gani, "Komunikasi Organisasi: Penerapannya Dalam Pengelolaan Perpustakaan" *Jurnal LIBRIA* Vol. 11 No. 2 (2019), Hlm. 129

¹⁵Ulfa Khusnul Khotimah, ed, "Komunikasi Antar Budaya di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang" *INTERACTION: Communication Studies Journal* Vol. 1 No. 3 (2024), Hlm.4.

a. Komunikasi Bisnis

Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang diimplementasikan untuk membangun kemitraan, memperoleh sumber daya intelektual, memajukan ide, suatu produk, layanan, atau organisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu nilai bagi bisnis yang dijalankannya. Komunikasi bisnis memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang aspek internal dan eksternal suatu bisnis.¹⁶

b. Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintah merupakan penyampaian gagasan, program, dan konsep pemerintah kepada masyarakat untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa pemerintah adalah komunikator dan masyarakat adalah komunikan. Namun, dalam keadaan tertentu dapat terjadi sebaliknya, dimana masyarakat berada dalam posisi untuk mengomunikasikan gagasan dan konsep, sementara pemerintah berada dalam posisi untuk mengamati apa yang diinginkan masyarakat. Dalam keadaan ini, pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mempertimbangkan dan menanggapi permintaan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.¹⁷

c. Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa gagasan, informasi, ajakan, atau hal-hal serupa kepada masyarakat yang luas. Pesan tersebut disampaikan melalui berbagai media seperti media massa, pidato di rapat umum, blog, situs jejaring sosial, kolom komentar, website atau blog, email, SMS, iklan, spanduk,

¹⁶Zein Adin dan Intania Hafni Yunia Izzati, "Dasar-dasar Komunikasi Bisnis" *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi (JRMK)* Vol. 3 No. 1 (2023), Hlm.34

¹⁷Erlina Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

serta media lainnya yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan secara luas.¹⁸

d. Komunikasi Pemasaran

Komunikasi pemasaran merupakan upaya menyampaikan pesan tentang kehadiran suatu produk di pasar kepada masyarakat umum, khususnya konsumen sasaran. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Komunikasi pemasaran adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memberi tahu, mengajak, atau mengingatkan konsumen mengenai produk atau merek yang dijual. Komunikasi ini menjadi wajah perusahaan dan mereknya, yang merupakan cara bisnis berinteraksi dengan konsumen serta membangun hubungan dengan mereka.¹⁹

Dari beragam jenis komunikasi yang dipaparkan diatas, penelitian ini cenderung relevan dengan jenis komunikasi massa, komunikasi publik dan komunikasi pemerintahan. Hal ini karena juru bicara menjadi sosok komunikator yang berkedudukan didalam suatu instansi pemerintahan. Selain itu, berbagai pesan yang disampaikan kepada publik juga turut melibatkan media masa dan tentunya isi berkaitan erat dengan informasi pemerintahan, khususnya mengenai program dan kebijakan pemerintah daerah.

1.5.2. Pola Komunikasi

Pola diartikan sebagai cara kerja yang tersusun dari unsur-unsur atau bentuk-bentuk tertentu, dimana hal tersebut didasari pada teori-teori yang ada. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “pola” diartikan sebagai suatu bentuk atau

¹⁸ Syarifuddin dan Rahmawati Djaffar, “Pola Komunikasi Publik di Era Digital” *Jasima: Jurnal Komunikasi Korporasi Dan Media* Vol. 3 No. 2 (2022). Hlm.173

¹⁹Kevin Rusman, Desie M.D Warouw dan Yuriewaty Pasoreh, “Peranan Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Hasil Penjualan Produk PT. Pokphanluwuk Sulawesi Tengah” *ejournal “Acta Diurna* Vol. 4 No. 5 (2015). Hlm.1

sistem, cara atau bentuk (struktur) yang tepat, yang mana pola dapat dikatakan contoh atau cetakan.²⁰

Dalam konteks penelitian ini, pola komunikasi dijelaskan sebagai cara atau bentuk hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses mengirim dan menerima pesan dengan cara yang tepat agar pesan tersebut dapat dengan jelas dipahami.²¹ Pendapat lain mengungkapkan bahwa pola komunikasi adalah cara atau model yang menggambarkan proses komunikasi, sehingga terdapat beberapa bentuk pola yang digunakan dalam berkomunikasi. Dalam setiap pola komunikasi, penerima pesan akan memberikan umpan balik sebagai bagian dari aktivitas menyampaikan pesan dalam proses komunikasi tersebut. Hal ini membuat pola komunikasi tersebut memiliki kesamaan dengan proses komunikasi secara keseluruhan.²²

Menurut Tubbs dan Moss, pola komunikasi atau hubungan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu komplementer dan simetris. Dalam hubungan komplementer, satu pihak menunjukkan perilaku dominan sementara pihak lain menunjukkan perilaku tunduk. Sementara itu, dalam hubungan simetris, kedua pihak saling berinteraksi dengan tingkat kesamaan. Dominasi dilakukan oleh kedua belah pihak secara seimbang, atau kepatuhan dijawab dengan kepatuhan.²³

Pola komunikasi yang dikaji dalam penelitian ini mengacu pada deskripsi alur komunikasi yang digunakan oleh individu berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi untuk menyampaikan pesan atau memengaruhi penerima pesan. Mengacu pada prosedur yang digunakan untuk pertukaran informasi antara individu atau

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 1996), Hlm.778.

²¹Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004).

²²Ngalimun, *Komunikasi Interpersonal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). Hlm.

²³Tubbs dan Moss, *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi* Editor Deddy Mulyana (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

kelompok, seperti aturan dan norma yang mengatur penggunaan bahasa dan proses komunikasi.

Penggunaan pola komunikasi mempengaruhi efektivitas proses komunikasinya. Penerapan pola komunikasi oleh seorang juru bicara akan memberikan gambaran mengenai keberhasilan penyampaian pesan yang dilakukan, sehingga program maupun kebijakan yang akan disampaikan dapat dipahami dengan baik.

Pola komunikasi juga merupakan bagian dari proses komunikasi itu sendiri. Jika proses komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka pesan yang disampaikan tidak akan sampai dengan benar kepada penerima. Akibatnya, penerima tidak dapat memberikan respons atau umpan balik yang memadai. Hal ini bisa disebut sebagai kegagalan dalam proses komunikasi tersebut.²⁴

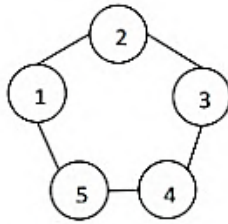
Kajian dan pembahasan mengenai pola komunikasi memunculkan beragam pandangan mengenai bentuk-bentuk pola komunikasi. Joseph A Devito menjelaskan bahwa pola komunikasi dibagi menjadi 5 bentuk pola, diantaranya:²⁵

1. Pola Lingkaran

Pola komunikasi lingkaran memungkinkan setiap anggota berinteraksi dengan dua anggota yang paling dekat dengannya. Pola ini tidak memiliki titik sentral atau tokoh pemimpin, karena semua anggota memiliki peran dan kedudukan yang setara. Setiap orang memiliki kemampuan yang sama untuk memengaruhi kelompok tersebut.

²⁴H.A.W. Widjaja, *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

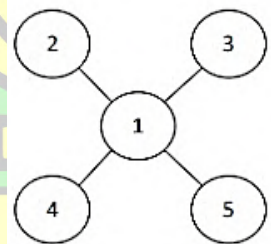
²⁵Abdullah, Masmuh, *Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek* (Malang: UMM Press, 2013).



Gambar 1.5.2.1. Pola Komunikasi Lingkaran
(Sumber: Konsep Pola Komunikasi menurut Joseph A Devito dalam Abdullah Masmuh, 2013)

2. Pola Roda

Pola struktur roda memiliki pusat yang jelas, yaitu sebagai penerima atau sumber informasi. Pemimpin adalah satu-satunya orang yang bisa mengirimkan serta menerima pesan dari seluruh anggotanya. Jika seorang anggota ingin berkomunikasi dengan anggota lainnya, pesan tersebut hanya disampaikan melalui pusat, yaitu pemimpinnya.

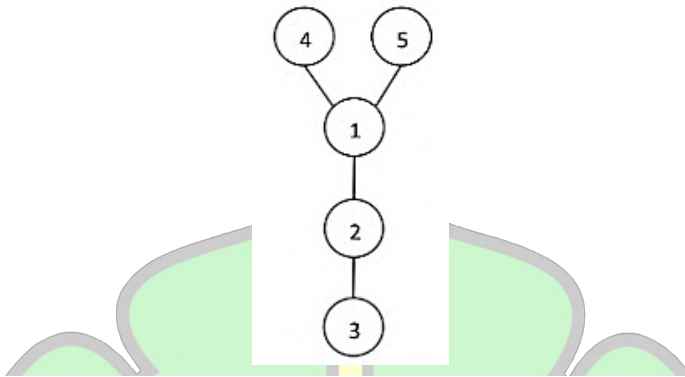


Gambar 1.5.2.2. Pola Komunikasi Roda
(Sumber: Konsep Pola Komunikasi menurut Joseph A Devito dalam Abdullah Masmuh, 2013)

3. Pola Y

Struktur Y memiliki tingkat sentralisasi yang lebih rendah dibandingkan struktur roda, tetapi lebih tinggi dibandingkan struktur lainnya. Dalam pola struktur Y, terdapat dua pusat yang bertugas

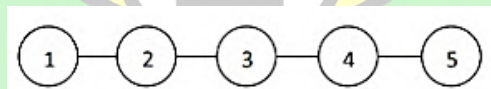
menerima atau menyampaikan pesan. Berikut gambaran pola komunikasi Y:



Gambar 1.5.2.3. Pola Komunikasi Y
(Sumber: Konsep Pola Komunikasi menurut Joseph A Devito dalam Abdullah Masmuh, 2013)

4. Pola Rantai/Bersambung

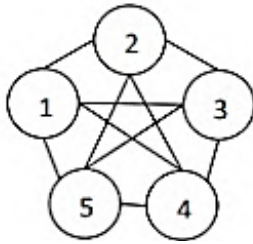
Pola struktur rantai sedikit berbeda dari pola struktur lingkaran, yaitu anggota yang berada di ujung hanya bisa berkomunikasi dengan satu anggota lainnya. Sementara itu, anggota yang berada di tengah cenderung lebih bertindak sebagai pemimpin dibandingkan anggota yang berada di posisi lainnya.



Gambar 1.5.2.4. Pola Komunikasi Rantai/bersambung
(Sumber: Konsep Pola Komunikasi menurut Joseph A Devito dalam Abdullah Masmuh, 2013)

5. Pola Bintang

Pola bintang dapat menyerupai pola struktur lingkaran, di mana semua anggota sama besar dan memiliki pengaruh yang setara terhadap anggota lainnya. Namun dalam pola ini, setiap anggota bisa berkomunikasi langsung dengan semua anggota lainnya. Pola ini memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara penuh. Gambaran pola komunikasi bintang sebagai berikut:



Gambar 1.5.2.5. Pola Komunikasi Bintang
(Sumber: Konsep Pola Komunikasi menurut Joseph A Devito
dalam Abdullah Masmuh, 2013)

Dari penjabaran kelima bentuk pola komunikasi tersebut, penelitian ini akan mengkaji jenis pola komunikasi yang diterapkan oleh juru bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam upaya untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah.

1.5.3. Juru bicara

Menurut McNair, Juru bicara adalah seorang pria atau wanita yang memiliki kemampuan untuk menjadi representasi dari seorang aktor politik atau organisasi politik, serta memiliki otoritas untuk menyampaikan pesan atau berbicara.²⁶ Lebih lanjut menurut Seitel jabatan juru bicara di lingkungan pemerintah daerah menjadi posisi yang sangat strategis. Seorang juru bicara bukan hanya orang yang dapat mengucapkan kata-kata, tetapi juga harus meyakini dan percaya pada keputusan yang telah dibuat oleh atasan atau pemimpinnya.²⁷

Dalam hal ini, Bupati maupun Wakil Bupati tentunya menjadi sumber berita yang dinanti oleh media massa. Oleh karena itu, adanya juru bicara sangat penting sebagai sarana komunikasi yang mampu menyampaikan informasi resmi sebagai perwakilan suara pemerintah. Peran juru bicara diharapkan dapat menjaga serta meningkatkan citra dan reputasi dari pihak yang diwakilinya.

²⁶Silvianus Alvin. "Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 sebagai Humas Pemerintah" *Jurnal Komunikasi*, Vol. 14 No. 01 (2020). Hlm.45

²⁷Silvianus Alvin. *Strategi Komunikasi Politik...* Hlm. 45

Juru bicara sebagai bagian dari kehumasan pemerintah diharuskan memiliki kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/ Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah serta turut pula merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur pedoman mengenai tugas dan cara kerja dalam bidang kehumasan yang berlaku di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Cutlip *ed* dalam bukunya *Effective Public Relations* menyebutkan bahwa, Etos kerja seorang juru bicara haruslah proaktif. Oleh karena itu, juru bicara perlu memahami perkembangan terkini mengenai isu-isu yang terkait dengan pihak yang diwakili, sebelum isu tersebut berkembang menjadi krisis. Langkah-langkah pencegahan harus dilakukan karena pemerintah merupakan target utama dari komunikasi. Seorang juru bicara pemerintahan harus menjadikan diri mereka sebagai penentu arah pembahasan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²⁸

Disamping itu, juru bicara juga merupakan bagian penting dari sebuah Government Public Relations (GPR). GPR merupakan program utama yang bertujuan agar masyarakat memahami tindakan pemerintah dan turut serta dalam proses pembangunan. Pelaksanaan GPR dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Dasar kerja dari Government Public Relations adalah pengelolaan informasi dan komunikasi secara berkelanjutan guna mencapai pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program serta kebijakan pemerintah.²⁹

²⁸Silvianus Alvin. *Strategi Komunikasi Politik*....Hlm.49

²⁹Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "Lingkup Program Government Public Relations" https://www.kominfo.go.id/content/detail/6857/lingkup-program-government-public-relations/0/pp_gpr (diakses pada 4 Februari 2024).

Menurut Ruslan, GPR atau Humas Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Humas Pemerintah memainkan dua peran, yaitu peran taktis yang bersifat jangka pendek dan peran strategis yang bersifat jangka panjang. Dalam peran taktis, Humas Pemerintah bertugas menyampaikan pesan dan informasi yang efektif, agar dapat memotivasi masyarakat dan memengaruhi keputusan serta sikap masyarakat secara signifikan melalui pesan yang diberikan. Sementara itu, dalam peran strategis, Humas Pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, memberikan masukan, saran, gagasan, serta ide-ide kreatif untuk melaksanakan program lembaga yang bersangkutan.³⁰

Lebih lanjut, secara garis besar tujuan Humas Pemerintah menyangkut tiga hal yaitu:³¹

a. Reputasi dan Citra

Tugas humas tidak terlepas dari pembentukan reputasi dan citra organisasi. Hal ini berarti bahwa citra yang positif akan berhubungan erat dengan tingkat akses publik terhadap hasil atau output dari organisasi tersebut.

b. Jembatan Komunikasi

Humas berperan sebagai komunikator dan mediator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

c. Hubungan yang Saling Menguntungkan

Humas harus memastikan bahwa pemerintah dalam menjalankan operasinya memiliki niat baik untuk mewujudkan tanggung jawab sosialnya, serta diekspresikan melalui hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan publik.

Merujuk pada konsep dan perpektif keislaman, juru bicara atau yang juga disebut mubaligh digambarkan sebagai sosok yang memiliki peran penting dan berakar pada konsep komunikasi yang

³⁰Ruslan, *Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi: Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

³¹ Betty Wahyu Nilla Sari, *Humas Pemerintah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

efektif serta penyaluran pesan yang benar. Kata **بَلِغًا** *balighan* terdiri dari huruf-huruf Bā, Lām, dan Gain. Para ahli bahasa mengatakan bahwa semua kata yang terdiri dari huruf-huruf tersebut memiliki arti menyampaikan sesuatu ke sesuatu yang lain. Kata ini juga memiliki makna "cukup", karena kecukupan berarti mencapai batas yang diperlukan. Seseorang yang mampu menyusun kata dengan baik sehingga pesannya dapat tersampaikan dengan jelas disebut *baligh*. Sementara *mubaligh* adalah orang yang menyampaikan suatu berita dengan cukup kepada orang lain.³²

Dalam Islam, komunikasi merupakan salah satu alat penting dalam menyampaikan pesan khususnya ajaran agama dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, seorang juru bicara dituntut untuk dapat memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Lebih lanjut berdasarkan pandangan Islam, sebagai seorang penyampai pesan, sosok juru bicara harus memiliki beberapa kriteria penting, diantaranya:

- a. Penyampai Pesan yang Jujur dan Benar. Islam sangat menekankan pentingnya berkata benar dan jujur dalam menyampaikan pesan. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat 70:³³


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (jujur)"

Hal inilah yang kemudian mendasari bahwa seorang juru bicara harus menyampaikan kebenaran, tidak menambah atau mengurangi isi pesan, dan tidak menyebarkan fitnah atau informasi yang salah.

³²Suisyanto, *Retorika Dakwah dalam Perspektif Al-Quran* (Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru, 2020), Hlm. 49

³³Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab (33):70, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

- b. Amanah dalam Menyampaikan Informasi. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim harus amanah atau dapat dipercaya dalam setiap tindakannya. Seorang juru bicara, yang memegang amanah untuk menyampaikan informasi, harus menjaga kepercayaan tersebut. Dalam hadits Rasulullah SAW beliau bersabda:

مَا خَطَبْنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

"Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak dapat dipercaya" (HR. Ahmad).

- c. Menyampaikan Pesan dengan Hikmah (Kebijaksanaan). Dalam Al-Qur'an, Surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman:³⁴

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui, siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk"

Seorang juru bicara dalam Islam harus pandai memilih kata-kata dan cara penyampaian yang sesuai dengan konteks, situasi, dan audiens. Kebijakan dalam berbicara penting untuk memastikan pesan diterima dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain.

³⁴Al-Qur'an Surat An-Nahl (16):125, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

d. Menghindari Ghibah dan Fitnah

Dalam Islam, ghibah (menggunjing) dan fitnah sangat dilarang. Seorang juru bicara harus memastikan bahwa dalam menyampaikan informasi, dia tidak menyinggung atau menyebarkan keburukan orang lain. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Swt. berfirman:³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang."

Dalam catatan sejarah peradaban Islam, pada masa dakwah Rasulullah SAW, juga telah dikenal keberadaan juru bicara, meskipun dalam hal penyebutan tidak menggunakan istilah juru bicara secara spesifik, melainkan juru dakwah atau da'i.

Hal ini terjadi pada masa hijrahnya Rasulullah SAW ke madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW merancang beberapa kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan. Salah satu usaha yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah tiba di Madinah yaitu membuat kelompok-kelompok da'i yang terdiri dari beberapa orang untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai suku yang ada di luar kota Madinah. Diantara kelompok da'i yang dikirimkan ke provinsi-

³⁵Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat (49): 12, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

provinsi untuk memantapkan Islam dengan mengajar manusia tentang Islam adalah Muaz bin Jabal ke Yaman dan Au bin Abi Thalib ke Yamamah.³⁶

Dari pembahasan ini, dapat di analisis bahwa sejak zaman kepemimpinan Rasulullah SAW, telah terdapat upaya untuk menunjuk dan mempercayakan metode penyampaian pesan-pesan dakwah keislaman kepada tokoh-tokoh atau da'i untuk selanjutnya disebarkan ke wilayah yang lebih luas.

1.5.4. Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah

Dihimpun dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sementara kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.³⁷

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki berbagai program dan kebijakan yang peneliti himpun dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026.

Penelitian ini akan berfokus terhadap pola komunikasi juru bicara pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan mengenai program dan kebijakan pemerintah pada tahun 2024 dan 2025 dikarenakan juru bicara pemerintah saat ini mulai menjabat pada

³⁶ Arifin Zain, *Sejarah Dakwah Klasik (Periode Rasulullah dan Khulafa Ar-Rasyidin)* (Surakarta: Citra Sains LKBN, 2015), Hlm. 82

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

tahun 2024 dan masih menjalankan jabatannya sebagai juru bicara sampai dengan saat ini tahun 2025.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 tersebut, untuk mendukung pencapaian tema pembangunan, maka disusun program prioritas daerah dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024, yaitu diantaranya:³⁸

1. Prioritas Daerah 1: Peningkatan Mutu Pendidikan, Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran Prioritas Daerah 1 adalah:
 - a. Meningkatkan kompetensi, pemerataan distribusi, dan kedisiplinan tenaga pendidik;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar;
 - c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - d. Optimalisasi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
 - e. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan;
 - g. Meningkatkan ketersediaan pangan;
 - h. Meningkatkan kelancaran pasokan, distribusi, dan stabilitas harga pangan pokok; dan
 - i. Meningkatkan keseimbangan gizi pangan yang dikonsumsi masyarakat.
2. Prioritas Daerah 2: Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan.
Sasaran Prioritas Daerah 2 adalah:
 - a. Meningkatkan konsumsi rumah tangga;
 - b. Meningkatkan belanja pemerintah;
 - c. Meningkatkan investasi
 - d. Melakukan hilirisasi produk;

³⁸Bappeda Kabupaten Aceh Barat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024, (Bappeda Aceh Barat, 2024).

- e. Optimalisasi peran masyarakat dan perusahaan swasta dalam pembangunan;
- f. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
- g. Meningkatkan cakupan informasi lowongan pekerjaan; dan
- h. Menyediakan lapangan pekerjaan.

3. Prioritas Daerah 3: Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah.

Sasaran Prioritas Daerah 3 adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur;
- b. Meningkatkan prestasi SDM di bidang olah raga dan kepemudaa;
- c. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila;
- d. Menumbuhkan budaya inovasi;
- e. Melaksanakan reformasi birokrasi; dan
- f. Meningkatkan partisipasi pemilih, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban pemilu tahun 2024.
- g. Perbaiki tata kelola dan penyelenggaraan data melalui prinsip Satu Data Indonesia (SDI) untuk mewujudkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

4. Prioritas Daerah 4: Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Keistimewaan Aceh.

Sasaran Prioritas Daerah 4 adalah:

- a. Meningkatkan pembinaan dan pemahaman nilai-nilai syariat Islam di masyarakat;
- b. Menegakkan aturan Syariat Islam;
- c. Meningkatkan kualitas dan peran dayah; dan
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fungsi sarana ibadah Islam.

5. Prioritas Daerah 5: Pemantapan Infrastruktur untuk memenuhi layanan dasar dan Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi.

Sasaran PD 5 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- b. Memantapkan infrastruktur layanan dasar dan pendukung perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah;
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana dan mitigasi bencana;
- d. Meningkatkan sarana prasarana kebencanaan;
- e. Meningkatkan kapasitas SDM kebencanaan;
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- g. Mencegah pencemaran dan kerusakan SDA LH.

Sementara itu Prioritas Daerah (PD) dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut.³⁹

1. Prioritas Daerah 1: Meningkatkan Nilai Tambah Produk Guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran Prioritas Daerah 1 adalah:

- a. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan;
- b. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan;
- c. Meningkatkan konsumsi rumah tangga;
- d. Meningkatkan investasi;
- e. Melakukan hilirisasi produk;
- f. Optimalisasi peran masyarakat dan perusahaan swasta dalam Pembangunan
- g. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
- h. Meningkatkan cakupan informasi lowongan pekerjaan;
- i. Menyediakan lapangan pekerjaan;
- j. Meningkatkan ketersediaan pangan;
- k. Meningkatkan kelancaran pasokan, distribusi, dan stabilitas harga pangan pokok;

³⁹Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 (Bappeda Aceh Barat, 2025)

2. Prioritas Daerah 2: Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.

Sasaran Prioritas Daerah 2 adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi, pemerataan distribusi, dan kedisiplinan tenaga pendidik;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar;
 - c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan Kesehatan; dan
 - d. Optimalisasi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).
3. Prioritas Daerah 3: Menumbuhkan budaya Riset dan Inovasi terutama dalam pencapaian target Pembangunan

Sasaran Prioritas Daerah 3 adalah:

- a. Menumbuhkan budaya inovasi.
4. Prioritas Daerah 4: Menyediakan Infrastruktur Dasar dalam berbagai sektor Pembangunan

Sasaran Prioritas Daerah 4 adalah:

- a. Memantapkan infrastruktur layanan dasar dan pendukung perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah.
5. Prioritas Daerah 5: Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pelayanan Publik terutama akselerasi penerapan IT.

Sasaran Prioritas Daerah 5 adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur;
 - b. Melaksanakan reformasi birokrasi; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi pemilih, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban pemilu tahun 2024.
6. Prioritas Daerah 6: Optimalisasi Potensi Daerah Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah.
- Sasaran Prioritas Daerah 6 adalah:
- a. Meningkatkan belanja pemerintah;

- b. Meningkatkan prestasi SDM di bidang olah raga dan kepemudaan;
 - c. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila;
 - d. Meningkatkan pembinaan dan pemahaman nilai-nilai syariat Islam di Masyarakat;
 - e. Menegakkan aturan Syariat Islam;
 - f. Meningkatkan kualitas dan peran dayah; dan
 - g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fungsi sarana ibadah Islam.
7. Prioritas Daerah 7: Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana
- Sasaran Prioritas Daerah 7 adalah:
- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana dan mitigasi bencana;
 - b. Meningkatkan sarana prasarana kebencanaan;
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM kebencanaan;
 - d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - e. Mencegah pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - f. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut, pada penelitian ini juga merangkum pembahasan mengenai kebijakan pembangunan daerah yang bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026.

Kebijakan pembangunan tahun 2024 merupakan lanjutan dari kebijakan pembangunan tahap pertama tahun sebelumnya, serta menjadi penentu keberhasilan pembangunan tahap III. Adapun tema pembangunan tahun ke-2 adalah “Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota Legislatif. Menyediakan Lapangan Pekerjaan, dan Meningkatkan Produktivitas Guna Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi”

Tahun 2024 merupakan tahun politik yang ditandai dengan penyelenggaraan pesta demokrasi untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk menyukseskan acara ini pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan seluruh masyarakat dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan gampong agar untuk meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Pada tahun 2024 kebijakan pembangunan difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian yang dilakukan melalui penyediaan sarana pertanian, peningkatan cakupan sumber daya air pertanian yang saat ini masih berkisar di angka 31 persen melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis, peningkatan kapasitas petani serta peningkatan akses pemasaran produk pertanian. Peningkatan produksi dan produktivitas juga dilakukan pada sektor perikanan, perkebunan dan peternakan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui penyuluhan dan pendampingan serta menjaga rantai distribusi produk, sehingga harga tetap stabil serta mampu terserap oleh pasar secara optimal.

Kemudian kebijakan pembangunan tahun 2025 adalah tahun strategis dalam pembangunan pada masa 4 (empat) tahun perencanaan ini. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi masyarakat telah mulai berjalan. Di tahun ini pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian yang sudah dapat dimanfaatkan. sehingga fokus pembangunan dapat diarahkan pada tema "Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui Stabilisasi Produktivitas dan Pengembangan Hilirisasi Produk, serta Meningkatkan Daya Saing Daerah".

Tahun 2025 merupakan puncak pembangunan untuk periode 2023-2026 dan merupakan tahun kedua dari pelaksanaan program peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun ini, produktivitas pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan

melalui implementasi kebijakan pada tahun sebelumnya diharapkan mulai stabil. Stabilisasi produktivitas tanaman pangan diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan cakupan sumber daya air ke sebagian besar wilayah pertanian. Upaya lain yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas petani dengan adanya pendampingan dari tenaga penyuluh. Pada sektor perikanan, peningkatan kapasitas nelayan dan pelaku usaha pembudidaya ikan melalui peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap/pembudidayaan serta adanya pendampingan program diharapkan akan mampu menjaga produktivitas tetap stabil dan terus meningkat.

Fokus kebijakan pembangunan juga diarahkan pada hilirisasi produk sektor primer (pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan). Pengembangan hilirisasi produk dilakukan melalui fasilitasi akses pembiayaan pada UKM/IKM Hilir, transfer teknologi untuk meningkatkan diversifikasi produk hingga pemberian bantuan modal usaha agar UKM/Hilir semakin berkembang. Selain itu, peningkatan daya saing daerah berbasis inovasi dan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan 4 (empat) aspek utama daya saing daerah, yaitu Aspek Faktor Penguat, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pasar, dan Aspek Ekosistem Inovasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, berbagai program dan kebijakan ini tentu akan memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga diperlukan penyampaian informasi yang efektif guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan realisasi program dan kebijakan tersebut.

1.5.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan pola komunikasi dan tema penelitian ini diperlukan sebagai pedoman dan acuan dalam konteks penguatan referensi sekaligus menunjukkan perbandingan dari hasil penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul **“Analisis Dampak Gaya Komunikasi Juru Bicara KPK Terhadap Persepsi Publik”**

Penelitian Sigit Pramono Hadi pada tahun 2020, yang telah di publikasikan pada Inter Komunika: Jurnal Komunikasi Vol 5, No 1, Tahun 2020.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa Sejak didirikan tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pusat perhatian publik dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam bidang penindakan KPK sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pelaku korupsi yang dilanjutkan dengan konperensi pers dengan tujuan menjelaskan duduk perkara tindakan korupsi yang disangkakan kepada pelaku.

Di dalam lembaga KPK terdapat Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang bertugas untuk menyampaikan seluruh informasi internal KPK kepada publik. Namun yang lebih sering diberi kewenangan untuk menyampaikan informasi ke publik adalah Juru Bicara KPK, terutama untuk informasi yang menyita perhatian publik seperti proses OTT. Sedangkan Humas lebih berperan dalam penyampaian informasi secara umum misalnya seperti penyelenggaraan acara yang berkaitan dengan kampanye anti korupsi. Baik Biro Humas maupun Juru Bicara KPK berada di bawah kendali Sekretariat Jenderal KPK.

Identifikasi masalah penelitian ini adalah seberapa kuat dampak gaya komunikasi Juru Bicara KPK terhadap persepsi publik tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat dampak gaya komunikasi Juru Bicara KPK terhadap persepsi publik tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Paradigma penelitian ini adalah positivistik karena didalamnya terdapat pola hubungan sebab akibat antar variabel yang akan diteliti. Hal tersebut terkait dengan Dampak Gaya Komunikasi Juru Bicara KPK Terhadap Persepsi Publik khususnya dalam Kajian tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan demikian maka data-data yang dianalisis merupakan data-data yang formatnya adalah numerik. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, maka peneliti akan meneliti seberapa besar dampak gaya komunikasi Juru Bicara KPK terhadap persepsi publik khususnya dalam kajian tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Metode penelitian ini adalah survei. Metode ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Dengan menggunakan metode ini maka peneliti mengambil jarak terhadap subjek penelitian sehingga dengan demikian data yang diperoleh adalah murni merupakan pendapat subjek tanpa campur tangan dari peneliti.

Penelitian ini bersifat eksplanatif. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan untuk mempelajari hubungan sebab akibat antara dua variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, hubungan sebab akibat ini adalah antara gaya komunikasi Juru Bicara KPK dengan persepsi publik khususnya dalam kajian tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Populasi penelitian ini adalah masyarakat dewasa di Jakarta Selatan. Masyarakat dewasa dipilih sebagai populasi karena sebagai masyarakat umum mereka diasumsikan memberi atensi, kritis dan sering menemukan langsung isu-isu komunikasi maupun persoalan-persoalan koruptif di negeri ini lewat pengalaman kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non probability sampling. Teknik sampling ini adalah metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling yakni teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan sampel yang kebetulan sesuai dengan kriteria dan langsung ditetapkan sebagai sampel.

Dari penelitian, didapati hasil bahwa responden sangat setuju Jubir KPK memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dari KPK. Hal ini sesuai dengan tugas pokok jabatan jubir yaitu menjadi wakil resmi lembaga KPK dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, responden berpandangan bahwa kasus-kasus korupsi adalah merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga pemberantasannya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan menyatukan fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan dalam satu lembaga yang sama yaitu lembaga KPK.

Selanjutnya, dari hasil analisis diperoleh fakta bahwa “Gaya Komunikasi” Jubir KPK berdampak positif terhadap “Persepsi Publik” dan dampak positif ini memiliki kekuatan pengaruh sebesar 15%. Dengan demikian diperoleh pemahaman bahwa persepsi publik tentang pemberantasan korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh gaya komunikasi jubir KPK sebesar 15%. Sementara sisanya yaitu sebesar 85% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

2. Penelitian yang berjudul **“Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 sebagai Humas Pemerintah”**

Penelitian Silvanus Alvin pada tahun 2020, yang telah di publikasikan pada Jurnal Komunikasi, Volume 14 No 1 Maret 2020 (43-62). Dasar dari penelitian ini dilatarbelakangi atas pentingnya PR dalam pemerintah yang kemudian mendasari lahirnya government public relations (GPR). UU KIP itu yang menjadi dasar yang membedakan praktik PR secara umum dengan PR pemerintah. Penyampaian informasi kepada masyarakat dan juga penyerapan informasi masyarakat tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebab, hal tersebut dapat memberikan citra yang buruk terhadap pemerintah. Apabila

mendapat imej buruk, bukan tidak mungkin pemerintah itu kehilangan legitimasinya atau kepercayaan dari masyarakat.

Wakil presiden, dalam ranah eksekutif, termasuk sebagai perwujudan dari pemerintah. Mandat serta beban kerja seorang Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2, Pasal 6 ayat 2, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Dalam ranah komunikasi politik, wakil presiden sebagai komunikator politik perlu mengkomunikasikan pesan-pesan politiknya dengan tepat kepada masyarakat. Bila pesan-pesan politik tidak disampaikan dengan baik, maka bisa saja wakil presiden kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Implikasi dari turunnya kepercayaan publik tentu bisa berefek pada melemahnya kepercayaan terhadap pemerintah secara menyeluruh. Untuk itu, wakil presiden membutuhkan bantuan praktisi PR demi menjaga komunikasi politik terhadap masyarakat terlaksana dengan baik dan benar.

Muhammad Jusuf Kalla (JK) telah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk dua periode berbeda, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 2004-2009 dan Presiden Joko Widodo pada 2014-2019. Dalam dua kurun waktu yang berbeda itu, JK memiliki sebuah tim PR, yang dikepalai oleh Husain Abdullah. Di lingkungan istana, jabatan resmi yang diemban oleh Husain adalah Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi atau biasanya dikenal sebagai Juru Bicara Wakil Presiden.

Pemerintah perlu membangun dan menjaga citra dirinya yang positif, agar pemerintahannya dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dipenuhi bila terjadi komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya. Implikasinya, akan ada pemahaman yang berujung pada dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah. Lebih lanjut, beban kerja pejabat eksekutif akan berlebihan bila terus menerus berhubungan dengan masyarakat, maka dari itu diperlukan peran juru bicara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai strategi komunikasi yang diterapkan Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Humas Pemerintah. Penelitian ini akan melihat bagaimana strategi-strategi yang dilakukan dan diterapkan, seperti penentuan citra pihak yang direpresentasikan, penentuan publik sasaran, menjalankan fungsi manajemen komunikasi dan fungsi proteksi, serta evaluasi. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur yang baik bagi praktisi juru bicara dalam menerapkan berbagai strategi yang tepat untuk membangun dan menjaga citra yang positif, agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 sebagai Humas Pemerintah secara komprehensif. Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara. Informan kunci yang diwawancarai untuk menunjang data kualitatif dari penelitian ini adalah Husain Abdullah selaku Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi.

Pada penelitian ini menggunakan konsep-konsep komunikasi dalam ranah komunikasi massa dan komunikasi politik. Peneliti mengimplementasikan konsep Strategi Komunikasi Politik, PR Pemerintah (Government Public Relations), Media Relations, Juru Bicara, dan Teori Agenda Setting.

Dalam praktiknya, juru bicara bersama dengan pihak yang ia representasikan menyamakan persepsi lebih dulu atas citra seperti apa yang akan dibangun. Dalam ranah politik, citra berarti pandangan publik atas aktor politi. Penentuan citra menjadi langkah yang pertama, karena citra seorang wakil presiden, entah itu baik atau buruk, dapat memengaruhi citra pemerintahannya yang sedang dipimpin.

Citra yang berusaha dibangun oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) adalah tokoh perdamaian dan negarawan atau politisi

yang mementingkan kepentingan bangsa daripada ego pribadi. Setelah menyamakan persepsi soal citra apa yang mau dibangun serta dipertahankan, langkah berikut ialah menentukan publik sasarannya. Publik di sini tidak dapat dipahami sebagai publik secara luas, melainkan sebuah segmen yang spesifik.

Selanjutnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keleluasaan bagi Husain selaku juru bicara yang mewakilinya untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Keleluasaan yang dimaksud berarti, tiap langkah yang dilakukan juru bicara tidak perlu mengantongi izin dari wakil presiden. Di lingkungan istana, juru bicara secara umum leluasa dalam menjalankan dua tugas utama, yaitu fungsi komunikasi dan fungsi proteksi.

Fungsi komunikasi ini dapat diklasifikasikan sesuai sistem komunikasinya menjadi dua yakni media arus utama atau pers, dan media sosial. Peneliti membedah dan membahas lebih dulu strategi komunikasi terhadap pers yang diterapkan oleh Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla. Apabila wakil presiden berhalangan maka menjadi tugas dari juru bicara untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Saat melakukan fungsi komunikasi ini, pernyataan yang keluar dari mulut juru bicara harus mengacu dan senada dengan pernyataan wakil presiden. Namun, juru bicara dibolehkan untuk memberi tafsir atas pesan yang disampaikan oleh pihak yang direpresentasikan.

3. Penelitian yang berjudul **“Pola Komunikasi Organisasi Humas Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Memberikan Layanan Informasi Kepada Masyarakat”**

Penelitian Eksanti dan Andi Muttaqin pada tahun 2023, yang telah di publikasikan pada RESPON Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Volume 4 No 1 2020 (208-215). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa komunikasi organisasi sebagai suatu bentuk komunikasi yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik atau masyarakat luas di tempat organisasi tersebut berada untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Interaksi antar anggota organisasi atau anggota dengan pemimpin organisasi bukan merupakan komunikasi organisasi, melainkan interaksi antar organisasi tersebut dengan sasaran komunikasi yang bukan bagian dari organisasi tersebut.

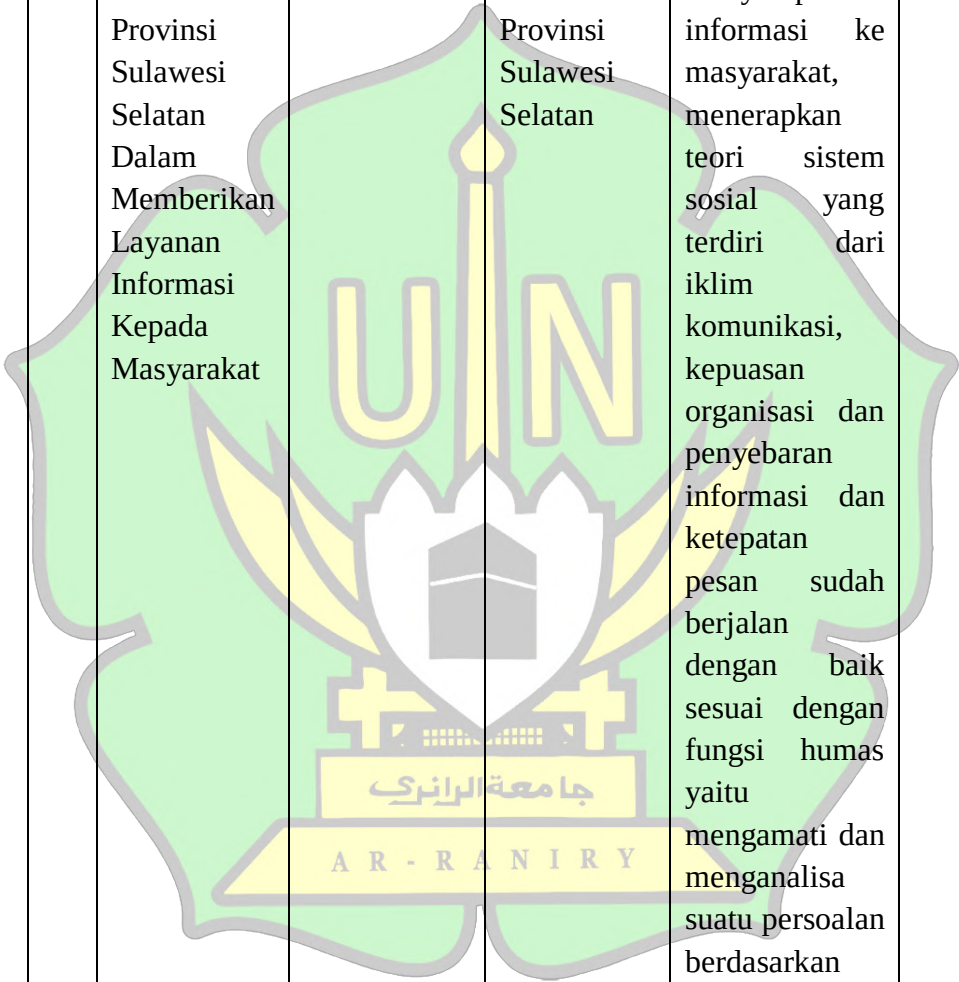
Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan teknik Pendekatan Kualitatif. Peneliti ingin mengetahui, bagaimana pola komunikasi organisasi humas pada kantor DPRD provinsi sulawesi selatan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Tercapainya penyebaran informasi dan ketepatan pesan dalam menyampaikan informasi ke masyarakat, menerapkan teori sistem sosial yang terdiri dari iklim komunikasi, kepuasan organisasi dan penyebaran informasi dan ketepatan pesan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi humas yaitu mengamati dan menganalisa suatu persoalan berdasarkan fakta di lapangan.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.5.4.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Analisis Dampak Gaya Komunikasi Juru Bicara KPK Terhadap Persepsi Publik	Fokus pada menganalisis sosok juru bicara	Meneliti terkait dengan gaya komunikasi	Gaya komunikasi jurnis KPK berdampak positif terhadap persepsi publik dan dampak positif ini memiliki kekuatan pengaruh sebesar 15%.

2.	Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 sebagai Humas Pemerintah	Fokus meneliti terkait dengan juru bicara	Meneliti terkait strategi komunikasi juru bicara	Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keleluasaan bagi Husain selaku juru bicara yang mewakilinya untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Keleluasaan yang dimaksud berarti, tiap langkah yang dilakukan juru bicara tidak perlu mengantongi izin dari wakil presiden. Di lingkungan istana, juru bicara secara umum leluasa dalam menjalankan dua tugas utama, yaitu fungsi komunikasi dan fungsi proteksi.
----	--	---	--	---



3.	Pola Komunikasi Organisasi Humas Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Memberikan Layanan Informasi Kepada Masyarakat	Penelitian terkait dengan pola komunikasi	Pola Komunikasi Organisasi Humas Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Tercapainya penyebaran informasi dan ketepatan pesan dalam menyampaikan informasi ke masyarakat, menerapkan teori sistem sosial yang terdiri dari iklim komunikasi, kepuasan organisasi dan penyebaran informasi dan ketepatan pesan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi humas yaitu mengamati dan menganalisa suatu persoalan berdasarkan fakta di lapangan.
----	---	---	--	---

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam hal membahas juru bicara

maupun pola komunikasi. Namun terdapat perbedaan dalam hal lokasi penelitian, fokus spesifik, serta konteks penelitian.

1.6. Kerangka Teori

Teori merupakan pedoman penting dalam menentukan setiap elemen penelitian, mulai dari mendefinisikan masalah hingga menyusun laporan penelitian. Kerangka teoritis adalah kumpulan cara berpikir yang didasarkan pada berbagai teori untuk membantu peneliti. Fungsi teori adalah untuk secara sistematis memprediksi, menjelaskan atau meramalkan fakta-fakta yang ada dan menemukan hubungan di antara mereka.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) teori yang saling berkaitan serta menjadi barometer untuk mengkaji mengenai pola komunikasi juru bicara dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah di Kabupaten Aceh Barat. Teori-teori tersebut diantaranya adalah dasar teori komunikasi yaitu model Komunikasi Harold D Lasswell, Teori Kredibilitas Sumber (*Source Credibility Theory*), Model S-O-R (*Stimulus-Organism-Response*), dan Teori Keunggulan dalam Hubungan Masyarakat (*Excellence in Public Relations Theory*).

Asumsi terhadap relevansi penelitian ini menggunakan model Komunikasi Harold D Lasswell adalah bahwa untuk memahami proses komunikasi harus memperhatikan unsur-unsur yang mendukung terjadinya suatu komunikasi yang terdiri dari siapa, berkata apa, melalui saluran apa, untuk siapa, dengan efek seperti apa atau dapat diringkas dengan rumus S-M-C-R-E (*Source-Message-Channel-Receiver-Effect*).

Juru bicara dalam hal ini bertindak sebagai komunikator yang menyampaikan pesan maupun informasi terkait dengan program dan kebijakan pemerintah. Selain itu untuk menjangkau publik yang luas, juru bicara dapat saja menggunakan bentuk komunikasi langsung maupun dengan memanfaatkan media. Dalam

⁴⁰Yusuf, A Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

konteks penelitian ini, model Komunikasi Harold D Lasswell menjadi dasar yang membuktikan berlangsungnya komunikasi karena memenuhi semua unsur dalam komunikasi.

Disamping itu, penelitian ini mengkaji pola komunikasi juru bicara dengan menggunakan asumsi dasar Teori Kredibilitas Sumber (*Source Credibility Theory*). Dalam hal ini, sosok juru bicara dilihat sebagai sumber informasi yang menyampaikan pesan. Teori ini menekankan bahwa efektivitas pesan dalam komunikasi sangat bergantung pada kredibilitas sumber yang menyampaikan pesan tersebut. Kredibilitas ini umumnya diukur berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu keterpercayaan (*trustworthiness*), keahlian (*expertise*), dan daya tarik (*attractiveness*).⁴¹ Dalam konteks juru bicara pemerintah, kredibilitas juru bicara menjadi kunci utama dalam memastikan penerimaan, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap program serta kebijakan yang disampaikan.

Kemudian, pengaplikasian model S-O-R dalam kajian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis cara pesan tersebut disampaikan oleh juru bicara sebagai sebuah stimulus yang efektif. Stimulus dalam penelitian ini merujuk pada pesan, pola komunikasi, media, atau strategi yang digunakan oleh juru bicara dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah.

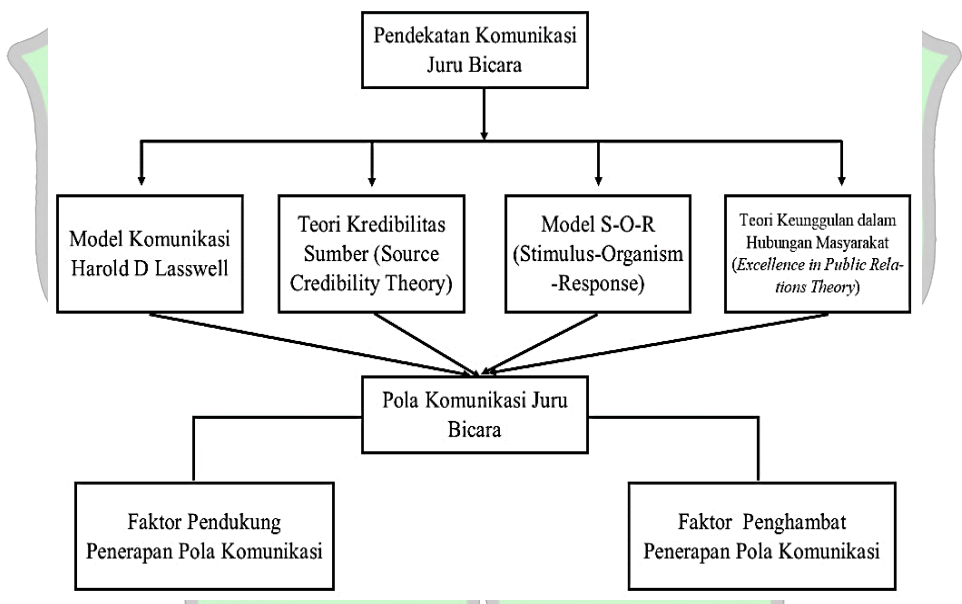
Selanjutnya, pada penelitian ini juga akan mengkaitkan Teori Keunggulan dalam Hubungan Masyarakat (*Excellence in Public Relations Theory*) untuk memberikan gambaran landasan konseptual sebagai bagian dari proses mengevaluasi efektivitas pola komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Juru bicara pemerintah memegang peran sentral sebagai praktisi hubungan masyarakat. Untuk mencapai keunggulan dalam hubungan masyarakat, pola komunikasi juru bicara idealnya mengadopsi pendekatan komunikasi dua arah yang simetris. Hal ini

⁴¹Kismiyati El Karimah, Ichsanti Kamilah, dan Agus Setiawan, "Pengaruh Kredibilitas Komunikator Terhadap Kohesivitas Kelompok" *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora* Vol. 6 No.3 (2024), Hlm.222

berarti juru bicara tidak hanya menyampaikan informasi dari pemerintah kepada publik tetapi juga mendengarkan umpan balik, merespons kebutuhan, serta mengelola persepsi publik secara proaktif. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh juru bicara, sehingga nantinya akan didapati pola komunikasi yang diterapkan sekaligus melihat efektivitas komunikasi yang terjalin.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran pola komunikasi juru bicara dalam menyampaikan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan pola komunikasi tersebut. Adapun bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.6.1. Kerangka Pemikiran dalam Penelitian

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan kajian penelitian yang humanistik. Penelitian kualitatif mulanya berkembang dalam sosiologi di Chicago School pada tahun 1920-an-1930-an. Jenis penelitian kualitatif dapat pula diterapkan untuk mengkaji disiplin ilmu sosial lainnya termasuk pendidikan dan komunikasi.⁴²

Penalaran serupa juga disampaikan bahwa penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif atau suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁴³

Bogdan dan Taylor (1975) memaparkan bahwa, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁴ Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena didasarkan pada latar belakang alami manusia itu sendiri. Dengan kata lain, dalam metode ini peneliti tidak memberikan makna kepada gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat, tetapi mengolahnya sehingga simbol-simbol dan makna-makna dari gejala-gejala sosial itu sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri. Dalam kasus ini, manusia adalah instrumennya karena dapat memahami fenomena tersebut. Dengan kata lain, manusia menentukan realitas di lapangan.⁴⁵

Penelitian ini dilakukan secara langsung melalui pengamatan dan wawancara tentang isu-isu yang terjadi. Berdasarkan teori dan konsep relevan yang dipahami, peneliti akan dapat memperoleh informasi dan data penelitian sebanyak-banyaknya. Penelitian ini

⁴²Denzin, Norman K., Lincoln, Yvonna S, (ed), "Handbook of Qualitative Research" dalam A. Rani Usman, *Etnis China Perantauan di Aceh*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009). Hlm. 120

⁴³Noor, Juliansyah, *Metotologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana, 2011).

⁴⁴Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Hlm. 4

⁴⁵A. Rani Usman, *Etnis China Perantauan di Aceh* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), Hlm. 121

mencoba memberikan pemahaman dan fakta dalam hal penerapan pola komunikasi sesuai dengan kenyataan dan kondisi yang sebenarnya dilapangan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang mempelajari sekelompok orang, suatu objek, suatu situasi, suatu sistem pemikiran, atau serangkaian kejadian pada saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi, ilustrasi, atau representasi yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan di antara fenomena yang dipelajari.⁴⁶

Maka berdasarkan pemaparan tersebut, jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam kajian penelitian ini diharapkan mampu menjawab dan menjelaskan secara konkret terkait pola juru bicara dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

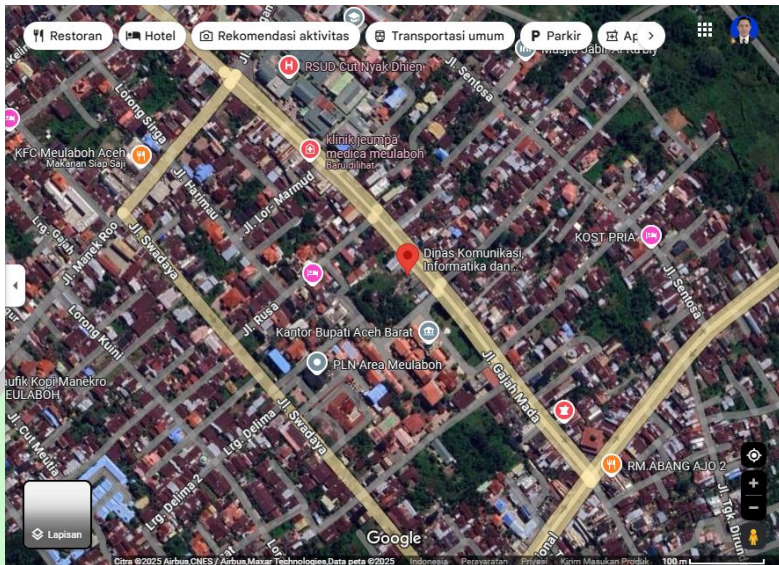
1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau area tertentu dimana sebuah penelitian dilakukan. Lokasi ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian, rumusan masalah, serta ketersediaan data yang diperlukan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat, tepatnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang terletak di Jalan Gajah Mada, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Pemilihan lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena pada pengamatan awal, peneliti menemukan masalah terkait dengan isu yang akan diteliti. Selain itu, lokasi ini juga dipilih karena juru bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas dan menjabat sebagai kepala bidang komunikasi dan informasi publik pada instansi tersebut.

⁴⁶Moh, Nasir,. (Cet 4). *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999) dalam A. Rani Usman, *Etnis China Perantauan di Aceh*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), Hlm. 121

Berikut gambaran peta lokasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat:



Gambar 1.7.2.1. Peta Lokasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat
(Sumber: Google Maps)

1.7.3. Sumber Data

Data merupakan basis penelitian yang paling penting. Kualitas dan keakuratannya secara langsung memengaruhi validitas dan keakuratan hasil yang diperoleh.⁴⁷ Secara umum sumber data dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan dikenal dengan data primer, sedangkan data kepustakaan dikenal dengan data sekunder.

Pengelompokan data berdasarkan metode pengumpulan, seperti data primer dan sekunder, memungkinkan peneliti untuk lebih mudah menilai keandalan dan relevansi informasi yang

⁴⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2019).

digunakan.⁴⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1.7.3.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.⁴⁹ Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer didapat dari kegiatan wawancara dan observasi. Peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pertanyaan wawancara akan berkembang sesuai dengan jawaban dari hasil wawancara yang nantinya tengah berlangsung.

1.7.3.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan dapat diperoleh dari catatan penelitian sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari kajian literatur berupa company profil, buku-buku, artikel, atau tulisan pada media massa, foto, arsip, lembaga, website lembaga, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian.⁵⁰ Pada penelitian ini, data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan komunikasi, komunikasi publik, komunikasi pemerintahan, juru bicara dan kehumasan pemerintah.

⁴⁸Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Vol. 5 No. 3 (2024). Hlm.111

⁴⁹M, Vivin Masyhuri, Maharani E dan Achmad Sani, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan contoh Riset Fenomenologi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

⁵⁰Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

1.7.4. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

1.7.4.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau organisme sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Moleong menyebutkan informan sebagai subjek penelitian, dimana artinya adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi later penelitian.⁵¹

Subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi informan utama dan informan pendukung. Informan utama yaitu pejabat juru bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang sedang menjabat saat proses pengumpulan data dilakukan, sementara informan pendukung terdiri dari Bupati Aceh Barat, 1 orang dosen pengajar dari Universitas Teuku Umar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi, 2 orang wartawan yang bertugas di Kabupaten Aceh Barat dan 1 orang Ketua Organisasi Masyarakat. Rincian daftar informan utama dan informan pendukung akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian wawancara dalam penelitian ini.

Pemilihan subjek penelitian tersebut ditentukan atas dasar kapasitas dari masing-masing informan untuk memberikan data yang komprehensif sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini, juru bicara menjadi informan utama karena pola komunikasi dalam menyampaikan informasi terkait dengan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dilakukannya adalah objek penelitian yang akan dikaji, sehingga juru bicara menjadi subjek penelitian utama.

Sementara itu, pada penelitian ini Bupati Aceh Barat menjadi salah satu informan pendukung dikarenakan kinerja dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh juru bicara sangat berkaitan erat dengan informasi pemerintah yang bersumber dari Bupati selaku pimpinan daerah. Oleh karena itu, keterangan yang diperoleh dari Bupati Aceh Barat akan mampu melengkapi data penelitian.

Lebih lanjut, ranah kerja juru bicara untuk mengelola komunikasi publik khususnya dalam hal menyampaikan program

⁵¹Lexy, J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*...Hlm. 132.

dan kebijakan pemerintah membuat interaksi dengan berbagai media massa menjadi sangat intens dilakukan, sehingga wartawan yang bertugas di Kabupaten Aceh Barat dan masih menjalin hubungan kerja dengan juru bicara ini juga turut menjadi informan pendukung dalam penelitian.

Kemudian, untuk memperoleh gambaran terkait efektifitas sekaligus respon masyarakat terhadap penyampaian pesan yang dilakukan oleh juru bicara, informasi yang bersumber dari organisasi masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga pada penelitian ini dipilih pula suatu organisasi masyarakat sebagai informan pendukung untuk mendapatkan data dan keterangan.

Informan pendukung lainnya adalah dosen pengajar dari Universitas Teuku Umar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi. Data pendukung tambahan dari informan ini menjadi bagian penting untuk melengkapi hasil penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pola komunikasi.

1.7.4.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi sasaran dari penelitian. Sasaran penelitian tidak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara spesifik tergambar dalam rumusan masalah penelitian.⁵² Berkaitan dengan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa objek penelitian menjadi suatu dasar penting sekaligus arah kajian penelitian tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah pola komunikasi yang dilakukan oleh juru bicara dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

⁵²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 76

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif, maka terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1.7.5.1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) ialah orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) ialah yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara.⁵³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*depth interview*) dengan jenis wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*). Wawancara mendalam adalah metode memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui pertanyaan dan jawaban antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa panduan (*guide*).⁵⁴ Penelitian ini juga dilakukan dengan jenis wawancara semi terstruktur yang merupakan jenis wawancara dimana pewawancara (*interviewer*) mempunyai daftar pertanyaan tertulis namun masih memungkinkan untuk mengajukan pertanyaan secara bebas yang terkait dengan permasalahan penelitian agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap.⁵⁵

Pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan berupa pertanyaan tertulis yang telah dipersiapkan untuk memudahkan pewawancara dalam mencari data, namun masih memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan diluar pedoman wawancara yang tetap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh informasi yang lebih mendalam. Pertanyaan yang akan ditanyakan bersifat terbuka, sehingga tidak mempunyai batasan panjang jawaban yang akan diutarakan oleh informan.

Lebih lanjut, wawancara juga dilakukan secara terbuka. Penelitian kualitatif sebaiknya menggunakan wawancara terbuka

⁵³Lexy, J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*...Hlm. 132

⁵⁴Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi*...Hlm. 108

⁵⁵Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*....Hlm.67

yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai serta mengetahui maksud dan tujuan wawancara.⁵⁶ Sebelumnya, informan akan diberitahukan terlebih dahulu oleh peneliti tentang gambaran keseluruhan terkait penelitian ini sehingga informan benar-benar mengerti arah penelitian yang sedang dilakukan ini.

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya informan ditentukan untuk tujuan tertentu saja setelah dilakukan pertimbangan dilapangan terhadap narasumber yang memiliki kapasitas dan penguasaan informasi.

Adapun daftar rincian informan utama dan informan pendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7.5.1.1. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Azwardi, AP., M.Si	Pj. Bupati Aceh Barat	Kantor Bupati Aceh Barat
2.	Hidayat, SE	Juru Bicara Aceh Barat	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
3.	T. Fadil	Wartawan RRI Meulaboh	Ketua SWI Aceh Barat
4.	Sadul Bahri	Wartawan Serambi	Ketua PWI Aceh Barat
5	Said Fadhlain	Dosen	Dosen Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar
6.	Fajar Hendra Irwan	Ketua	Forum Masyarakat Aceh Barat (FORMAT)

⁵⁶Lexy, J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif...*Hlm. 132

1.7.5.2. Observasi

Selain melakukan wawancara, dalam penelitian ini juga menggunakan observasi sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung sesuatu objek untuk melihat secara dekat kegiatan yang dilakukan objek.⁵⁷

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini memfokuskan pada pengamatan terhadap informan selaku Pejabat Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, pengamatan yang peneliti lakukan hanya kepada informan utama dengan melihat pola komunikasi yang dibangun, aktivitas penunjang peran sebagai juru bicara, hubungan dengan publik internal dan eksternal, sampai dengan kedekatan bersama pers dan masyarakat. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan dalam merupakan observasi nonpartisipan. Artinya peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang tengah diamati dan hanya sebagai pengamat independen.⁵⁸

1.7.5.3. Dokumentasi

Dalam mendukung penelitian yang komprehensif, penelitian ini turut menggunakan metode dokumentasi. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁹ Dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari laporan, dokumen internal, publikasi yang dilakukan Pemerintah, maupun dokumen-dokumen penunjang kinerja juru bicara pemerintah daerah.

1.7.6. Teknik Analisis Data

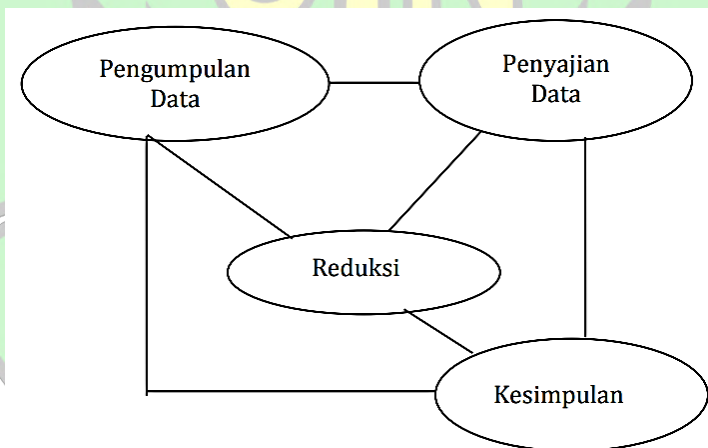
⁵⁷Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*....Hlm.69

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

⁵⁹Basroni dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta., 2008) Hlm. 158

Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data yang diperoleh dari catatan, wawancara, observasi, atau dokumen guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap topik yang diteliti dan menjelaskan hasilnya kepada orang lain.⁶⁰ Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif melibatkan pemrosesan data, pengorganisasian, pengelompokan ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, pencarian dan penemuan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan hasil yang dapat disampaikan kepada orang lain.⁶¹

Penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman untuk mengolah serta menganalisis data, atau yang juga dikenal dengan metode analisis data interaktif. Berikut gambaran proses analisis data dari model Miles dan Huberman:



Gambar 1.7.6.1. Analisis data dari model Miles dan Huberman

⁶⁰Muhadjir Noeng, "Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama" dalam Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 (2018). Hlm.84

⁶¹Lexy, J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*...Hlm. 132

Analisis data dari model Miles dan Huberman melibatkan tiga alur diantaranya yaitu:⁶²

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti meringkas, memilih poin-poin utama, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema serta polanya. Dengan demikian, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan jika perlu mencari lebih banyak data.

Saat mereduksi data, setiap peneliti bertindak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh temuan. Jadi, ketika peneliti melakukan penelitian dan menemukan sesuatu yang menurut mereka tidak diketahui dan belum terpola, inilah yang perlu diperhatikan ketika melakukan reduksi data.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data berbentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman, metode yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah penggunaan teks naratif. Menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan temuan. Selain penyajian dalam bentuk teks naratif, data juga dapat disajikan dalam bentuk grafik, matriks, jaringan (jaringan kerja), dan diagram.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang disajikan pada awalnya masih bersifat tentatif dan akan berubah jika tidak ada bukti kuat yang ditemukan pada

⁶² Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), Hlm. 95

tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan dan mengumpulkan data, jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang disajikan akan menjadi kesimpulan yang dapat diandalkan.

Kesimpulan yang muncul dari penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang sebelumnya tidak tersedia. Penemuan dapat tersaji dalam bentuk deskripsi atau gambar objek yang sebelumnya samar, dan setelah diperiksa, menjadi jelas. Kesimpulan ini bisa berupa hubungan kausal atau interaksi, atau hipotesis atau teori.

1.7.7. Teknik Validasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik validasi data dengan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Denzin, terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁶³

1.7.8. Rancangan Jadwal Penelitian

Rancangan jadwal kegiatan penelitian mulai dari pengajuan judul hingga sidang Tesis dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

⁶³ Lexy, J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*...Hlm. 330

Tabel 1.7.8.1 Rancangan Jadwal Penelitian Tesis

Kegiatan	2024			2025							
	O k t	N o v	D e s	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g t
Pengajuan Judul											
Penyusunan Proposal dan Bimbingan											
Seminar Proposal											
Revisi dan Bimbingan											
Penelitian Lapangan, Analisis Data, Penyusunan Laporan dan Bimbingan											
Seminar Hasil dan Perbaikan											
Sidang Tesis											

1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rencana penulisan yang berisi struktur untuk mengatur suatu penelitian dan membuatnya lebih mudah diakses dan dipahami. Sistematika ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara sistematis, mulai dari tahap

pengenalan topik hingga penutup yang memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti telah membagi format penulisan kedalam 4 bab utama yang saling terkait. Pembahasan pada bab kemudian diklasifikasikan kembali menjadi sub-bagian yang lebih kecil yang menjelaskan rancangan penelitian ini secara keseluruhan. Sistematika penulisan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama menyajikan pemaparan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua berisi kajian teoritis yang berupa pemaparan teori-teori yang digunakan untuk mengkaji objek penelitian dan unsur-unsur pendukung yang berkaitan dengan pola komunikasi juru bicara dalam menyampaikan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti penelitian yang membahas hasil dan temuan penelitian. Data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif disajikan secara luas dan mendalam.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir penelitian ini berisi dua sub bab yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum pokok persoalan utama dan jawabannya secara ringkas dan jelas. Subbagian berikutnya berisi saran dari penulis.